



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II  
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023**



## **IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**

# **STRATEGI PENGEMBANGAN PROFESIONALISME SDM PBJ DENGAN AKREDITASI LPPBJ LEMDIKLAT POLRI DAN PEMBANGUNAN E-LEARNING MELALUI KOLABORASI DENGAN LKPP**



**ROCHMAN ADJI, S.T.  
NDH 027**

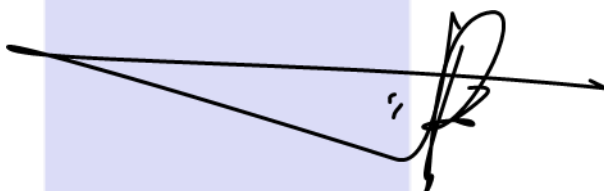
## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : ROCHMAN ADJI, S.T.  
NIP : 197407272003121008  
NDH : 027  
Instansi : LEMDIKLAT POLRI  
Jabatan : PAUR SUBBAG FASKON BAGLOG ROENMIN LEMDIKLAT  
POLRI  
Judul : **STRATEGI PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS SDM**  
Proyek **PBJ DENGAN AKREDITASI LPPBJ LEMDIKLAT POLRI**  
Perubahan **DAN PEMBANGUNAN E-LEARNING MELALUI**  
**KOLABORASI DENGAN LKPP**

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Implementasi Proyek Perubahan yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2023.

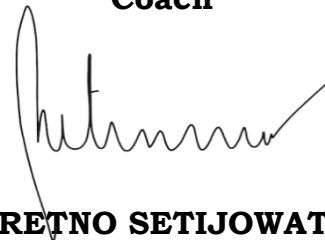
Jakarta, November 2023

**Mentor**



**HERY SASONGKO, S.I.K.**  
**KOMBES POL NRP. 68040530**

**Coach**



**Dr. Ir. RETNO SETIJOWATI, M.S.**  
**WIDY AISWARA AHLI UTAMA LAN**

## EXECUTIVE SUMMARY



Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu Tenaga Ahli Pengadaan di Lemdiklat Polri dan Satuan Pendidikan jajarannya harus terus ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lemdiklat Polri sebagai Satker Polri yang membidangi pendidikan dan pelatihan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan profesionalitas SDM Polri baik melalui pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan, maupun pelatihan. Guna pelaksanaan program pelatihan dibidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Lemdiklat Polri harus memiliki akreditasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Oleh karena itu pemenuhan akreditasi Lemdiklat Polri sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) perlu segera dilaksanakan.

Sebagaimana tema pembangunan Lemdiklat Polri yang tercantum dalam Rencana Kerja Lemdiklat Polri Tahun 2023 yaitu "*Transformasi Pendidikan dan Pelatihan Polri menuju Kampus Presisi guna menjadikan SDM Polri yang unggul di Era Police 4.0*" maka pelaksanaan pelatihan PBJ melalui *e-learning* merupakan suatu terobosan inovasi yang perlu dilaksanakan sebagai sarana pelatihan PBJ yang memberikan kemudahan dan kesempatan yang luas khususnya kepada Personel Polri dan PNS Polri.

Dengan terakreditasinya Lemdiklat Polri sebagai LPPBJ dan terselenggaranya *e-learning* PBJ Lemdiklat Polri diharapkan akan meningkatkan profesionalitas Tenaga Ahli Pengadaan khususnya pada Polri dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dalam memberikan kontribusi dan manfaat terhadap pelayanan Polri kepada masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kami sampaikan kehadiran Allah swt atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Implementasi Proyek Perubahan dalam rangka mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2023 Angkatan XXVIII dengan tema Strategi Pengembangan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Akreditasi LPPBJ Lemdiklat Polri dan Pembangunan E-Learning melalui Kolaborasi dengan LKPP.

Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini merupakan gambaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahap implementasi selama 2 (dua) bulan) dalam rangka mewujudkan rencana aksi yang telah disusun guna merealisasikan tujuan proyek perubahan yang telah direncanakan.

Sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan, kami menyadari apabila terdapat kekurangan dalam Implementasi Proyek Perubahan ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kebaikan kami guna keberlanjutan proyek perubahan ini.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, masukan, dan bimbingan dalam Implementasi Proyek Perubahan, terutama kepada Mentor, **Kombes Pol Hery Sasongko, S.I.K.**, Kabaglog Rorenmin Lemdiklat Polri selaku atasan dan *Coach*, **Dr. Ir. Retno Setijowati, M.S.**, Widyaiswara Ahli Utama Lembaga Administrasi Negara, **Bapak Hardi Afriansyah**, Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP, Tim Efektif, serta istri dan ananda tercinta atas do'a, dukungan dan semangatnya.

Jakarta, November 2023



ROCHMAN ADJI, S.T.

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	1
EXECUTIF SUMMARY	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
<b>RENCANA PROYEK PERUBAHAN</b>	<b>5</b>
I. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN	5
II. PENDAHULUAN	6
III. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	12
<b>IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN</b>	<b>17</b>
I. CAPAIAN PERUBAHAN TERHADAP RENCANA PROYEK PERUBAHAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN	17
II. KRITERIA KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN DALAM KEPEMIMPINAN STRATEGIS	27
III. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING	39
IV. PERUBAHAN PETA STAKEHOLDER	42
V. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN	43
V. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR	44
VI. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROPER	46
VII. PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	48
VIII. LESSON LEARNT	49
IX. PENUTUP	51
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>52</b>

# RENCANA PROYEK PERUBAHAN

## I. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahan ini berisikan langkah strategis yang perlu dilaksanakan oleh Lemdiklat Polri dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya di lingkungan Polri guna mewujudkan SDM Pengadaan Barang/Jasa Polri yang profesional melalui kolaborasi dengan LKPP.

Ditengah dinamika pengadaan barang/jasa yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi, maka peningkatan kemampuan dan profesionalitas Ahli Pengadaan adalah suatu keniscayaan yang harus dipenuhi. Minimnya pelaksanaan pelatihan pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri dan kurangnya Ahli Pengadaan pada beberapa Satker di jajaran Lemdiklat Polri merupakan suatu masalah yang harus segera diantisipasi.

Peningkatan kualitas dan kuantitas Ahli Pengadaan di lingkungan Polri melalui pelatihan PBJ perlu dilaksanakan secara rutin dan terprogram oleh Lemdiklat Polri. Oleh karena itu akreditasi Lemdiklat Polri sebagai LPPBJ perlu segera dilaksanakan. Guna mengoptimalkan pelaksanaan program pelatihan PBJ, maka perlu dilakukan suatu terobosan inovatif pembelajaran melalui *e-learning* PBJ Lemdiklat Polri.

Dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan ini agar berhasil dan sesuai dengan rencana diperlukan dukungan dari Kalemdiklat Polri, **Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si.** dan Karorenmin Lemdiklat Polri, **Brigjen Pol Drs. M.H. Ritonga, M.Si.**, Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP **Bapak Hardi Afriansyah**, serta bimbingan dan arahan dari Mentor, **Kombes Pol Hery Sasongko, S.I.K.**, Kabaglog Rorenmin Lemdiklat Polri selaku atasan dan *Coach*, **Dr. Ir. Retno Setijowati, M.S.**, Widyaiswara Ahli Utama Lembaga Administrasi Negara serta Tim Efektif yang telah membantu dan mendukung dengan sangat luar biasa.

## II. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang



Usai dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Joko Widodo menyampaikan lima program prioritas yang akan dikerjakan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri, dan salah satunya adalah **Pembangunan Sumber Daya Manusia**. "Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi."

Polri sebagai institusi yang berada di bawah Presiden memiliki visi yang bersinergi dengan visi Presiden, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Dan salah satu sasaran strategis Polri sebagai mana tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1132/V/2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah **Profesionalisme SDM** yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab Lemdiklat Polri untuk meningkatkan profesionalitas personel Polri melalui pendidikan dan pelatihan.

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, yang disingkat Lemdiklat Polri merupakan unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan, pengembangan dan pelatihan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

Dalam Rencana Strategis Lemdiklat Polri 2020 – 2024 disebutkan visi Lemdiklat Polri adalah “Terwujudnya Lemdiklat Polri sebagai pusat keunggulan” dengan misi yang pertama **“Mewujudkan SDM Polri yang siap pakai”** dan misi kedua **“mewujudkan penyelenggaraan Diklat Polri yang berkualitas di era Police 4.0”**, dimana salah satu sasaran strategisnya adalah “Kelembagaan yang akuntabel dan SDM yang Presisi” yang dicapai dengan arah kebijakan antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kababilitas SDM Lemdiklat dan Satdiklat Polri, dan peningkatan sarana dan prasarana Lemdiklat Polri.

Dalam Rencana Kerja Lemdiklat Polri Tahun 2023, tema pembangunan Lemdiklat Polri adalah *“Transformasi Pendidikan dan Pelatihan Polri menuju Kampus Presisi guna menjadikan SDM Polri yang unggul di Era Police 4.0”* dan salah satu sasaran prioritasnya adalah *“Kelembagaan yang Akuntabel dan SDM yang Presisi”*.



Bagian Logistik atau disingkat Baglog sebagai salah satu unsur pendukung di Lemdiklat Polri yang memiliki tugas antara lain administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Lemdiklat. Administrasi Logistik meliputi kegiatan berupa

pendataan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Subbag Fasilitas Konstruksi atau disingkat Subbag Faskon dan Subbag Materiil Logistik atau disingkat Subbag Matlog.

Dalam pelaksanaan tugas Baglog terdapat beberapa masalah, yaitu keterbatasan personel yang memiliki kompetensi di bidang Faskon, keterbatasan personel yang memiliki keahlian di bidang pengadaan barang/jasa, belum disahkannya standar sarana prasarana pendidikan dan

pelatihan, pelatihan kompetensi tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun, dan akreditasi Lemdiklat Polri sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Akreditasi “C” telah habis masa berlakunya tahun 2020 serta belum memenuhi persyaratan/belum lulus akreditasi pada saat pengajuan perpanjangannya karena Akreditasi “C” sudah tidak ada lagi.

Berkaitan dengan keterbatasan personel yang memiliki keahlian di bidang pengadaan barang/jasa, salah satu rencana kegiatan yang dilaksanakan Subbag Faskon pada tahun 2023 adalah melaksanakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 dan Ujian Sertifikasi serta Persiapan Ujian Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pokja Pemilihan dengan sasaran utama peserta dari Lemdiklat Polri dan Satdiklat Polri. Dengan belum diperpanjangnya akreditasi Lemdiklat Polri sebagai LPPBJ, maka untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Lemdiklat Polri tidak dapat menyelenggarakannya secara mandiri, penyelenggaraanya hanya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan LPPBJ lainnya atau melalui Pusat Pelatihan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PPSDM LKPP).

Guna memenuhi tenaga ahli pengadaan khususnya di Lemdiklat Polri dan Satdiklat Polri serta Polri pada umumnya, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, yaitu:

1. Mengupayakan akreditasi Lemdiklat Polri sebagai LPPBJ dengan mengajukan kembali kepada LKPP;
2. Membuat program pelatihan PBJ setiap tahun;
3. Penyusunan Grand Desain *E-Learning* PBJ Lemdiklat Polri;
4. Melakukan kerjasama dengan LKPP dalam rangka pemenuhan poin 1, 2, dan 3 di atas.

Dengan terakreditasinya Lemdiklat Polri sebagai LPPBJ, maka Lemdiklat Polri dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan PBJ secara mandiri, tidak hanya untuk personel Lemdiklat Polri dan Satdiklat Polri saja, namun juga personel Polri yang membidangi pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan tersusunnya program pelatihan PBJ setiap tahun akan memberikan dampak pada peningkatan keterampilan, keahlian dan

profesionalisme tenaga ahli pengadaan barang/jasa. Demikian pula apabila e-learning PBJ Lemdiklat Polri dapat terbangun, maka dapat menghemat biaya pelatihan dan memudahkan akses untuk mengikuti pelatihan. Dan untuk mewujudkan hal-hal tersebut tentunya diperlukan dukungan dan kerjasama dengan LKPP.

Dengan terlaksananya langkah-langkah strategis di atas secara bertahap dan berkesinambungan, diharapkan profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui kolaborasi dengan LKPP dapat terpenuhi.

## B. Tujuan Proyek Perubahan



Dalam rangka pencapaian proyek perubahan ini, tujuannya tidak terlepas visi, misi, dan salah satu sasaran strategis Lemdiklat Polri “Kelembagaan yang akuntabel dan SDM yang Presisi”. Oleh karena itu tujuan dari proyek perubahan sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Pendek (60 hari):
  - a. terpenuhinya data dukung akreditasi Lemdiklat Polri sebagai LPPBJ;
  - b. tersusunnya konsep Grand Desain *e-learning* PBJ Lemdiklat Polri;
  - c. tersusunnya konsep Perjanjian Kerja Sama Lemdiklat Polri dengan LKPP.
2. Tujuan Jangka Menengah (1 tahun):
  - a. terakreditasinya Lemdiklat Polri sebagai LPPBJ;
  - b. disahkannya Grand Desain *e-learning* PBJ Lemdiklat Polri;
  - c. terlaksananya Perjanjian Kerja Sama Lemdiklat Polri dengan LKPP.
3. Tujuan Jangka Panjang (2 s.d. 3 tahun):
  - a. Pembangunan *e-learning* PBJ Lemdiklat Polri;
  - b. kerjasama pelatihan PBJ dengan instansi lain.

### C. Manfaat



Manfaat jangka panjang yang diharapkan dari proyek perubahan ini adalah terpenuhinya jumlah Tenaga Ahli Pengadaan pada setiap Satker Polri di seluruh Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan *attitude* serta profesional dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal tersebut dimungkinkan dengan pelaksanaan pelatihan melalui *e-learning* PBJ Lemdiklat Polri.

Proyek perubahan ini diharapkan memberi manfaat tidak hanya kepada Lemdiklat Polri dan Satdiklat Polri, namun juga kepada seluruh Satker Polri dan masyarakat. Adapun manfaat proyek perubahan sebagai berikut:

1. Lemdiklat Polri (Internal):
  - a. Lemdiklat Polri terakreditasi sebagai LPPBJ;
  - b. Lemdiklat Polri sebagai LPPBJ dapat menyusun program pelatihan PBJ;
  - c. Lemdiklat Polri dapat menyelenggarakan pelatihan PBJ untuk personel Polri dan Instansi lain serta masyarakat dan mengeluarkan sertifikat pelatihan;
  - d. Lemdiklat Polri dapat menyelenggarakan ujian kompetensi PBJ;
  - e. Anggaran pelatihan lebih murah;
  - f. Pelatihan yang dilaksanakan lebih kredibel, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik;
  - g. Lemdiklat Polri memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan profesionalitas SDM PBJ secara nasional.
2. Satker-satker Polri (Eksternal):
  - a. Pegawai Negeri pada Polri dapat mengikuti pelatihan PBJ dimanapun melalui *e-learning* PBJ Lemdiklat Polri sehingga meningkatkan jumlah SDM PBJ-nya;
  - b. Keterampilan, keahlian dan profesionalitas SDM PBJ Polri meningkat;

- c. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di Satker-satker Polri menjadi lebih baik.

3. Masyarakat (Eksternal):

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri;
- b. Secara tidak langsung masyarakat dapat menikmati hasil pengadaan barang/jasa dengan terdukungnya sarana prasarana Polri melalui PBJ.

#### D. Output dan Outcome

1. Output

- a. Jangka Pendek

- 1) Surat pengajuan Akreditasi Lemdiklat Polri sebagai LPPBJ dan dokumen pendukungnya;
- 2) Konsep Grand Desain *E-Learning* PBJ Lemdiklat Polri;
- 3) Konsep Perjanjian Kerja Sama Lemdiklat Polri dengan LKPP.

- b. Jangka Menengah

- 1) Lemdiklat Polri terakreditasi "B" sebagai LPPBJ;
- 2) Disahkannya Grand Desain *E-Learning* PBJ Lemdiklat Polri.
- 3) Perjanjian Kerja Sama Lemdiklat Polri dengan LKPP ditandatangani;

- c. Jangka Panjang

- 1) Program pelatihan *e-learning* PBJ Lemdiklat Polri;
- 2) Menyelenggarakan pelatihan untuk personel PBJ Instansi lain.

2. Outcome

Outcome dari proyek perubahan ini adalah Lemdiklat Polri terakreditasi sebagai LPPBJ dan dapat menyelenggarakan program pelatihan PBJ baik dengan metode *e-learning*, *blended learning* maupun klasikal.

### III. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

#### A. Terobosan Inovatif



Solusi dari permasalahan di atas adalah dengan mengupayakan agar Lemdiklat Polri memperoleh Akreditasi sebagai LPP PBJ dari LKPP sehingga Lemdiklat Polri dapat melaksanakan pelatihan PBJ secara mandiri. Selain itu, untuk memberi kemudahan pegawai negeri pada Polri, yaitu anggota Polri dan PNS Polri mengikuti pelatihan PBJ, pelatihan kompetensi dan pelatihan teknis PBJ diperlukan terobosan inovatif berupa program pembelajaran secara online dan mandiri melalui e-learning PPBJ Lemdiklat Polri. Guna memperkuat dan memperkaya pengembangan Lemdiklat Polri sebagai LPPBJ maka perlu dilakukan kolaborasi dengan LKPP selaku lembaga yang bertugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### B. Pentahapan Rancangan Proper



Sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek perubahan maka perlu disusun tahapan-tahapan kegiatan dengan mempertimbangkan output, sumber daya, dan waktu pelaksanaan.

NO	KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANA	OUTPUT
<b>A JANGKA PENDEK (60 HARI)</b>				
1.	Pembentukan Tim Efektif	M3 September	Project Leader	Sprin Tim Efektif, Dokumentasi
2.	Rapat awal dengan Tim Efektif	M3 September	Project Leader & Tim Efektif	Undangan Rapat, Notulen Rapat, Absen, Dokumentasi
3.	Koordinasi dengan PPSDM LKPP terkait usulan Akreditasi	M4 September	Project Leader & Sub	Formulir Persyaratan

			Tim Akreditasi	Akreditasi, Dokumentasi
4.	Penyusunan kelengkapan Akreditasi	M1 - M4 Oktober	Project Leader & Sub Tim Akreditasi	Dokumen Persyaratan Akreditasi, Dokumentasi, Surat Usulan
5.	Koordinasi dengan PPSDM LKPP terkait penyusunan Grand Desain <i>E-Learning</i>	M1 Oktober	Project Leader & Sub Tim <i>e-learning</i>	Hasil Koordinasi, Dokumentasi
6.	Benchmarking LPPBJ	M2 Oktober	Project Leader & Tim Efektif	Hasil Benchmarking, Dokumentasi
7.	Koordinasi dengan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP terkait PKS	M2 Oktober	Project Leader & Sub Tim PKS	Hasil Koordinasi, Dokumentasi
8.	FGD dengan Stakeholder terkait penyusunan Grand Desain <i>E-Learning</i> dan PKS	M3 Oktober	Project Leader, Tim Efektif, Stakeholder	Undangan Rapat, Notulen Rapat, Absen, Dokumentasi
9.	Penyusunan dan pembahasan konsep Grand Desain <i>E-Learning</i>	M4 Oktober – M3 November	Project Leader, Sub Tim <i>e-learning</i> , Stakeholder	Rancangan konsep Grand Desain <i>E-Learning</i>
10.	Penyusunan konsep PKS	M4 Oktober – M3 November	Project Leader, Sub Tim PKS, Stakeholder, LKPP	Rancangan konsep PKS
<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>OUTPUT</b>
<b>B</b>	<b>JANGKA MENENGAH (1 TAHUN)</b>			
1.	Lemdiklat Polri terakreditasi sebagai LPPBJ	Maret 2024	Lemdiklat Polri & LKPP	Keputusan Akreditasi
2.	Penandatanganan PKS	April 2024	Lemdiklat Polri & LKPP	PKS

3.	Pengesahan Grand Desain <i>E-Learning</i>	September 2024	Lemdiklat Polri & Stakeholder	Grand Desain <i>E-Learning</i> PBJ Lemdiklat Polri
<b>C JANGKA PANJANG</b>				
1.	Pembangunan e-learning PBJ Lemdiklat Polri	Januari - Agustus 2025	Lemdiklat Polri & LKPP	<i>e-learning</i> PBJ Lemdiklat Polri
2.	Pemanfaatan e-learning untuk umum	September 2025	Lemdiklat Polri & Stakeholder	SDM PBJ

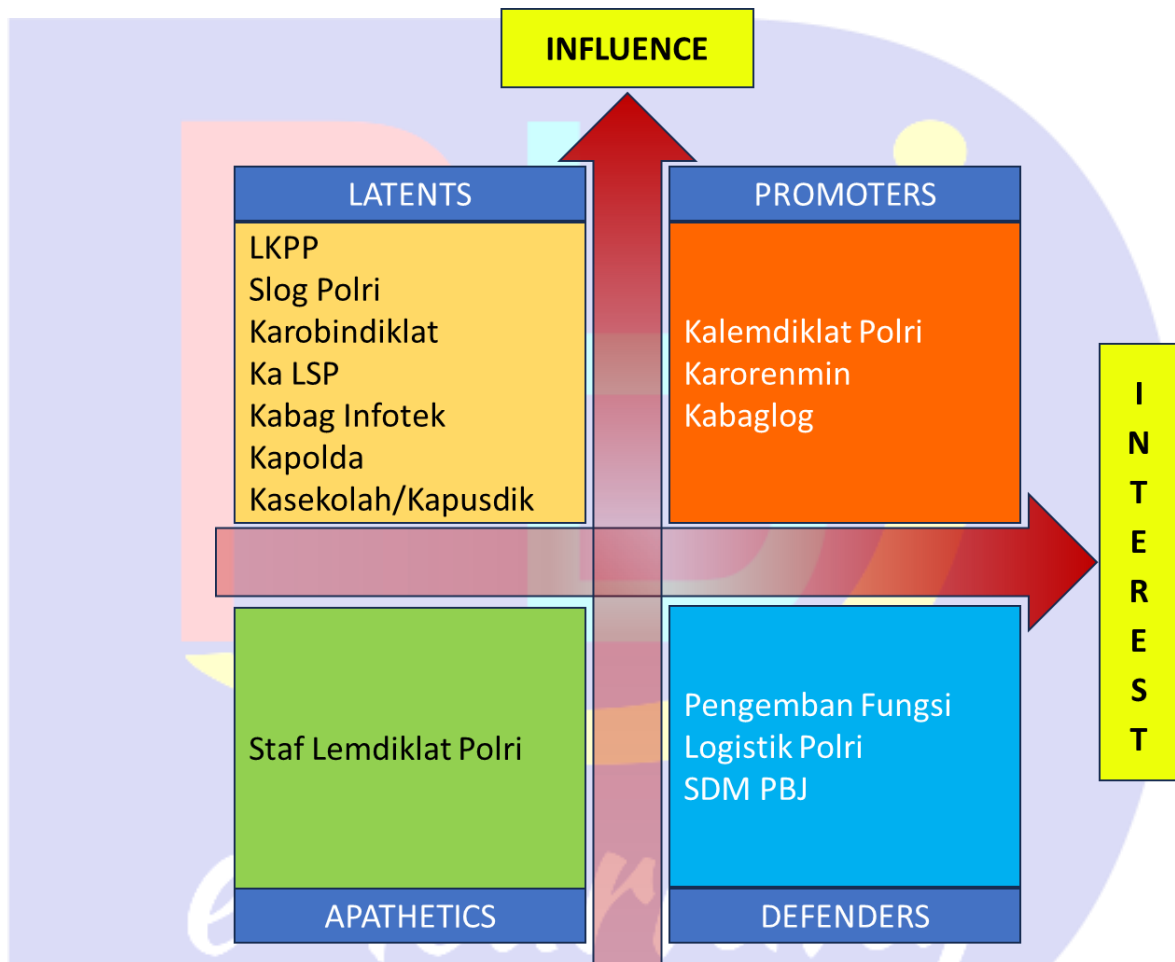
### C. Identifikasi Stakeholder



Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, pihak-pihak yang terlibat ataupun memiliki kepentingan dan hubungan diklasifikasikan menjadi stakeholder internal dan stakeholder eksternal.

1. Stekeholder Internal
  - a. Kalemdiklat Polri
  - b. Karorenmin Lemdilal Polri
  - c. Karobindiklat Lemdilal Polri
  - d. Ka LSP Lemdilal Polri
  - e. Kabag Infotek Lemdilal Polri
  - f. Staf Lemdiklat
2. Stekeholder Eksternal
  - a. LKPP
  - b. Slog Polri
  - c. Kapolda
  - d. Kasekolah jajaran Lemdiklat Polri
  - e. Kapusdik jajaran Lemdiklat Polri
  - f. Pengemban Fungsi Logistik Polri
  - g. SDM PBJ

Peta dukungan stakeholder sebagai berikut:



#### D. Strategi Komunikasi



Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap stakeholder sebagai berikut:

##### 1. Promoters

Sebagai pemeran kunci yang menjadi fokus utama dari waktu dan usaha mengelola stakeholder. Cara mengelola orang-orang di kriteria ini adalah dengan berkonsultasi, mendengarkan mereka dengan baik dan melaporkan perkembangan kegiatan.

##### 2. Lantens

Orang-orang ini harus dibuat tetap senang. Mereka dengan kekuatan yang besar tapi ketertarikan sedikit harus tetap merasa puas.

Komunikasi dilakukan dengan cara konsultasi dan koordinasi, menjelaskan benefit dan dampak bagi organisasinya serta tetap mendengarkan saran mereka.

3. Defenders

Orang-orang ini memiliki ketertarikan yang tinggi, tapi memiliki kekuatan yang kecil. Komunikasi dilakukan dengan pemberian informasi yang memadai, dan lakukan komunikasi yang baik dengan mereka agar mereka dapat mempromosikan proyek perubahan.

4. Apethetics

Orang dengan ketertarikan yang rendah dan kekuatan yang kecil. Oleh karena itu libatkan mereka agar tertarik dan memberikan kontribusi, dengan memberikan informasi dan edukasi.



*e-learning*

# IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

## I. CAPAIAN PERUBAHAN TERHADAP RENCANA PROYEK PERUBAHAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Dalam mengimplementasikan Proyek Perubahan ini, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berkembang pada saat implementasi, namun hal tersebut tidak merubah tujuan utama dari Proyek Perubahan ini yaitu meningkatkan profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahkan perubahan tersebut justru menjadikan pencapaian tujuan menjadi lebih terfokus dan terarah serta mendapatkan dukungan yang positif dari para stakeholder.

Perubahan yang terjadi dalam implementasi Proyek Perubahan setelah dilaksanakan rapat antara Tim Efektif dengan Staf LKPP pada tanggal 4 Oktober 2023. Namun dalam mengimplementasikan organisasi yang adaptif, yang mampu beradaptasi dan berinovasi dengan cepat dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi, maka dilakukan penyesuaian dan perubahan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun perubahan dalam pelaksanaan implementasi sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan penyusunan konsep Perjanjian Kerja Sama Lemdiklat Polri dengan LKPP, karena:

a. telah ada Nota Kesepahaman antara Polri dengan LKPP Nomor: NK/36/IX/2020; Nomor 48 TAHUN 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana dalam pelaksanaannya **Wakil dari Polri adalah Asisten Kapolri Bidang Logistik;**

b. telah ada Perjanjian Kerja Sama antara Polri dengan Kedepuitian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor: PKS/80/XII/2021; Nomor: 17 TAHUN 2021 tentang Pengembangan dan Integrasi



Sistem Informasi serta Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pada rapat tanggal 4 Oktober 2023 dengan LKPP, berkaitan dengan pelaksanaan Akreditasi, penyelenggaraan pelatihan PBJ dan penerapan *e-learning* PBJ Lemdiklat Polri cukup dilakukan melalui surat-menyurat. Penerapan *e-learning* PBJ Lemdiklat Polri dapat dilakukan setelah LPPBJ Lemdiklat Polri mendapatkan Akreditasi.



Dari rapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Akreditasi LPPBJ Lemdiklat Polri merupakan **kunci sukses** terlaksananya pengembangan profesionalisme SDM PBJ Polri. Mengingat Akreditasi LPPBJ Lemdiklat Polri telah habis masa berlakunya sejak tahun 2020, maka untuk mendapatkan Akreditasi Lemdiklat Polri harus melaksanakan kegiatan pelatihan PBJ pada tahun 2023 guna mendukung persyaratan mendapatkan Akreditasi tersebut.



3. Rapat tanggal 10 Oktober 2023 dengan LKPP di Lemdiklat Polri, selain membahas tentang Akreditasi LPPBJ Lemdiklat Polri dan *e-learning* juga membahas berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan yang akan dilaksanakan. Kegiatan pelatihan tersebut diperlukan untuk memenuhi dokumen pendukung Akreditasi LPPBJ Lemdiklat Polri.



Dalam rangka pemenuhan persyaratan Akreditasi dan pengembangan profesionalisme SDM PBJ Polri, khususnya Lemdiklat Polri maka dilaksanakan kegiatan pelatihan dengan anggaran yang berasal dari DIPA Satker Lemdiklat Polri T.A. 2023, yaitu:

1. Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 yang dilaksanakan dengan metode *blended learning* dengan jumlah peserta sebanyak 72 orang, dimana pelatihan secara e-learning menggunakan website [elearning.lkpp.go.id](http://elearning.lkpp.go.id) pada tanggal



24 Oktober s.d. 6 November 2023 dilanjutkan tatap muka pada tanggal 7 s.d. 8 November di Hotel Arosa Bintaro, Jakarta serta pelaksanaan Ujian Kompetensi PBJ Level-1 pada tanggal 9 November 2023 di Laboratorium Komputer Pusdik

Lantas Lemdiklat Polri, Serpong;

2. Sosialisasi dan Pelatihan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Satker Lemdiklat Polri dan Jajaran yang dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 31 Oktober s.d. 1 November 2023 bertempat di Hotel Grand Whiz Poinis Jakarta

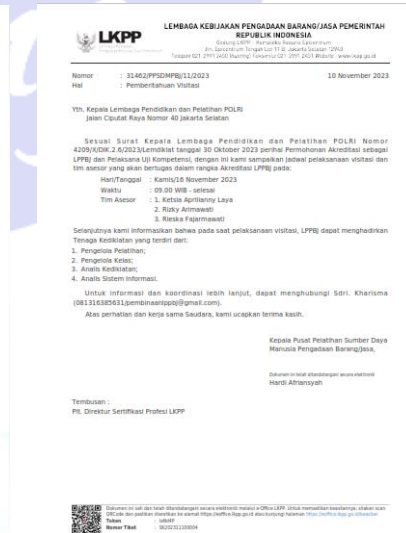
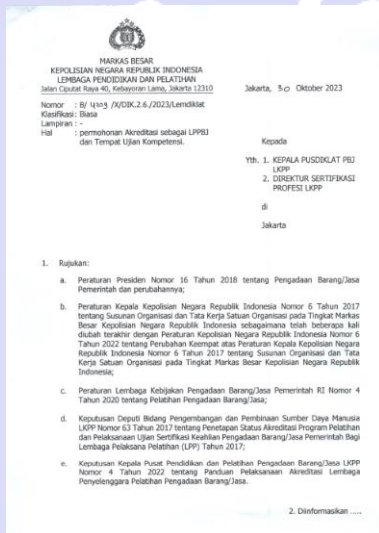


dengan peserta yang terdiri dari 36 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 34 orang Pokja Pemilihan;

3. Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan Satker Lemdiklat Polri dan Jajaran yang dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 15 s.d. 16 November 2023 bertempat di Hotel Arosa Bintaro, Jakarta dengan peserta yang terdiri dari 22 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 20 orang Pokja Pemilihan.



Pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan simultan dengan pengajuan Akreditasi LPPBJ Lemdiklat Polri yang telah diajukan pada tanggal 30 Oktober 2023. Dan pada tanggal 16 November 2023 telah dilakukan Visitasi oleh Tim Asesor Akreditasi LKPP.



Pencapaian tahapan rencana implementasi Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Profesionalisme SDM PBJ dengan Akreditasi LPPBJ Lemdiklat Polri dan Pembangunan E-Learning melalui Kolaborasi dengan LKPP sebagai berikut.

No.	Tahapan	Timeline	Output	Evidence	Keterangan
<b>JANGKA PENDEK</b>					
1.	Pembentukan Tim Efektif	M3 September	Sprin Tim Efektif, Dokumentasi	Sprin Tim Efektif	Telaksana
2.	Rapat awal dengan Tim Efektif	M3 September	Undangan Rapat, Notulen Rapat, Absen, Dokumentasi	Undangan Rapat, Notulen Rapat, Absen, Dokumentasi	Terlaksana
3.	Koordinasi dengan PPSDM LKPP terkait usulan Akreditasi	M4 September	Formulir Persyaratan Akreditasi, Dokumentasi	Surat Permohonan Koordinasi, Surat Persetujuan LKPP, Absensi, Absensi, Dokumentasi, Notulen Rapat dan paparan dari LKPP	Terlaksana, rapat sekaligus membahas terkait <i>e-learning</i> dan PKS serta Benchmarking
4.	Penyusunan kelengkapan Akreditasi	M1 - M4 Oktober	Dokumen Persyaratan Akreditasi, Dokumentasi, Surat Usulan	Surat Permohonan Akreditasi LPPBJ dan TUK, dokumen pendukung akreditasi	Terlaksana, ditambah dengan permohonan menjadi TUK (Tempat Uji Kompetensi)

					kepada Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP
5.	Koordinasi dengan PPSDM LKPP terkait penyusunan Grand Desain <i>E-Learning</i>	M1 Oktober	Hasil Koordinasi, Dokumentasi	Surat Undangan, Absensi, Dokumentasi dan Notulensi	Terlaksana, rapat sekaligus membahas tentang kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan
6.	Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1, Sosialisasi dan Pelatihan TKDN serta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi PPK dan Pokja Pemilihan	M1 -M2 Oktober	Dokumen Persiapan	TR Pemberitahuan, Surat Undangan, Surat Permohonan	Tidak ada dalam perencanaan, Terlaksana
7.	Benchmarking LPPBJ	M2 Oktober	Hasil Benchmarking, Dokumentasi		Dilaksanakan bersamaan dengan rapat tanggal 4 Oktober di LKPP

8.	Koordinasi dengan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP terkait PKS	M2 Oktober	Hasil Koordinasi, Dokumentasi		Tidak dilaksanakan, sudah ada Nota Kesepahaman Polri dengan LKPP dan PKS Aslog Kapolri dengan LKPP
9.	FGD dengan Stakeholder terkait penyusunan Grand Desain <i>E-Learning</i> dan PKS	M3 Oktober	Undangan Rapat, Notulen Rapat, Absen, Dokumentasi		Tidak dilaksanakan PKS Konsep draft E-Learning disusun oleh Tim Efektif E-Learning berkoordinasi dengan LKPP
10.	Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 dan Ujian Kompetensi	M3 Oktober – M2 November	Dokumen kegiatan	Sprin Panitia dan Peserta, Absensi, Dokumentasi, Laporan kegiatan	Tidak ada dalam perencanaan, Terlaksana

11.	Sosialisasi dan Pelatihan TKDN	M4 Oktober	Dokumen Kegiatan	Sprin Panitia dan Peserta, Absensi, Dokumentasi	Tidak ada dalam perencanaan, Terlaksana
12.	Bimbingan Teknis Uji Kompetensi PPK dan Pokja Pemilihan	M3 November	Dokumen Kegiatan	Sprin Panitia dan Peserta, Absensi, Dokumentasi	Tidak ada dalam perencanaan, Terlaksana
13.	Visitasi Tim Akreditasi LKPP	M3 November	Hasil Visitasi	BA Hasil Visitasi, Dokumentasi	Tidak ada dalam perencanaan, Terlaksana
15.	Visitasi Tim Aessor TUK via <i>zoom meeting</i>	M3 November	Hasil Visitasi	BA Hasil Visitasi, Dokumentasi	Tidak ada dalam perencanaan, Terlaksana
16.	Pemenuhan Kekurangan Dokumen Pendukung Akreditasi	M3 – M4 November	Dokumen Pendukung	Dokumen Pendukung Akreditasi	Tidak ada dalam perencanaan, Terlaksana
17.	Penyusunan dan pembahasan konsep Grand Desain <i>E-Learning</i>	M4 Oktober – M3 November	Rancangan konsep Grand Desain <i>E-Learning</i>		Tidak dilaksanakan pada tahap ini, dilaksanakan pada jangka menengah

18.	Penyusunan konsep PKS	M4 Oktober – M3 November	Rancangan konsep PKS		Tidak dilaksanakan
<b>JANGKA MENENGAH (1 TAHUN)</b>					
1.	Lemdiklat Polri terakreditasi sebagai LPPBJ	Maret 2024	Keputusan Akreditasi		
2.	Pengajuan permohonan fasilitasi MOOC menggunakan LMS Puslat SDM PBJ LKPP	Maret 2024	Surat Permohonan dan Penandatanganan <i>Service Level Agreement (SLA)</i>		Tidak ada dalam rencana Sebagai uji coba dan pengenalan LPPBJ Lemdiklat Polri menggunakan e-learning
2.	Penandatanganan PKS	April 2024	PKS		Tidak dilaksanakan
3.	Penyusunan dan pembahasan konsep Grand Desain <i>E-Learning</i>	April - Juli 2024	Rancangan konsep Grand Desain <i>E-Learning</i>		
4.	Pengesahan Grand Desain <i>E-Learning</i>	September 2024	Grand Desain <i>E-Learning</i> PBJ Lemdiklat Polri		Tidak dilaksanakan

JANGKA PANJANG (2 TAHUN)				
1.	Pembangunan e-learning PBJ Lemdiklat Polri	Januari - Agustus 2025	<i>e-learning</i> PBJ Lemdiklat Polri	
2.	Pemanfaatan e-learning	September 2025	SDM PBJ	

*e-learning*

## II. KRITERIA KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN DALAM KEPEMIMPINAN STRATEGIS



Kebahagiaan Proyek Perubahan tentunya dimulai dari tahapan perencanaan, yaitu dengan disusunnya Rancangan Proyek Perubahan yang tentunya telah diuji dan disetujui oleh Mentor dan Coach.

Langkah-langkah dalam melaksanakan Proyek Perubahan tentunya disusun untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.



Untuk **sesuatu yang baru**, langkah-langkah yang disusun merupakan rencana awal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dan merupakan *guidance* untuk mewujudkan tujuan. Namun adakalanya pencapaian tujuan

tersebut tidak serumit langkah-langkah yang telah disusun dan rencanakan. Langkah yang lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut tentunya akan dapat dicapai melalui komunikasi yang baik sehingga kolaborasi dan kerja sama tim dapat berjalan dengan baik.



Dalam menerapkan kepemimpinan yang adaptif tentunya tentunya harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dan situasi. Perubahan langkah dan rencana yang disusun tentunya harus

disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, sehingga tujuan yang telah direncanakan tetap tercapai.



Dalam strategi peningkatan profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa khususnya di lingkungan Polri langkah awal yang perlu dilakukan adalah **melakukan kolaborasi dengan LKPP**. Langkah tersebut telah dilakukan sejak awal Rancangan Proyek Perubahan melalui komunikasi sehingga mendapatkan dukungan dari LKPP khususnya Pusdiklat PBJ LKPP.

Langkah tersebut akan menjadi lebih efektif dengan adanya dukungan dari pimpinan Lemdiklat Polri terhadap Rancangan Proyek Perubahan yang telah dikomunikasikan sejak awal. Dengan dukungan dari pimpinan dan dukungan dari LKPP, maka perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi Proyek perubahan dapat diatasi.

**Akreditasi LPPBJ Lemdiklat Polri** merupakan langkah awal keberlanjutan Proyek Perubahan yang telah digagas, karena tanpa terakreditasi maka Lemdiklat Polri tidak dapat melakukan penyelenggaraan pelatihan PBJ melalui *e-learning*. Namun untuk mendapatkan Akreditasi tersebut bukanlah hal yang mudah, ada **15 (lima belas) instrumen** yang harus dipenuhi agar LPPBJ Lemdiklat Polri mendapatkan Akreditasi.

Lima belas instrumen yang harus dilengkapi tidak hanya berasal dari Bagian/Unit Kerja Project Leader yaitu Bagian Logistik, namun juga dari Bagian/Unit Kerja di Lemdiklat Polri. Kelima belas instrumen itu adalah:

1. Unsur Organisasi dengan bobot 75%, terdiri dari:
  - 1.1. Sub Unsur Kelembagaan, bobot 5%
  - 1.2. Sub Unsur Tenaga Kediklatan, bobot 40%, dengan komponen:
    - 1.2.1. Fasilitator Tetap (35%)
    - 1.2.2. Pengelola Pelatihan/MoT (20%)
    - 1.2.3. Pengelola Kelas (25%)
    - 1.2.4. Pengelola Sistem Informasi (15%0
    - 1.2.5. Analisis Kebutuhan Diklat (5%)
  - 1.3. Sub Unsur Fasilitas Pelatihan, bobot 25%
  - 1.4. Sub Unsur Program Kerja, bobot 10%
  - 1.5. Sub Unsur Pembiayaan, bobot 10%
  - 1.6. Sub Unsur Penjaminan Mutu, bobot 10%
2. Unsur Program dan Pengelolaan Program Pelatihan dengan bobot 25%, terdiri dari:
  - 2.1. Sub Unsur Kurikulum, bobot 25%
  - 2.2. Sub Unsur Pengelola Program, bobot 75%, dengan komponen:
    - 2.2.1. Perencanaan Penyelenggaraan Pelatihan (10%)
    - 2.2.2. Penyelenggaraan Pelatihan PBJ (10%)
    - 2.2.3. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan (80%), dengan sub komponen:
      - 2.2.3.1. Hasil Indeks Kepuasan Peserta
      - 2.2.3.2. Rata-rata Tingkat Kelulusan Ujian

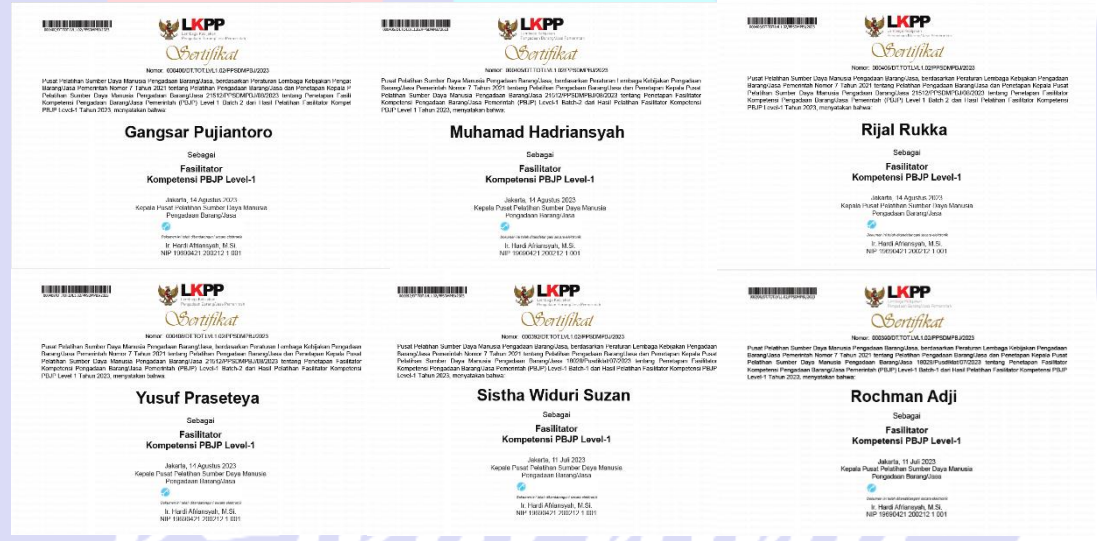


Setelah pelaksanaan rapat dengan LKPP tanggal 4 Oktober 2023, dilakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan data-data pendukung dengan melakukan koordinasi dengan Bagian/Unit Kerja di Lemdiklat Polri, seperti Bagian Perencanaan untuk data kelembagaan,

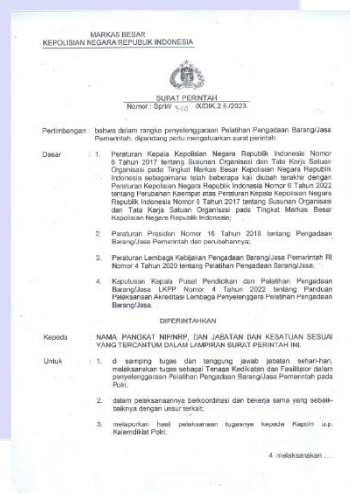




program kerja dan pembiayaan, Bagian Infotek untuk pengelola sistem informasi, Pusdik Lantas Lemdiklat Polri untuk fasilitas pelatihan, Bagian Kurikulum untuk unsur kurikulum, Bagian Pembinaan Pendidikan untuk laporan penyelenggaraan pelatihan, dan berkoordinasi dengan Fasilitator PBJ dari Korbrimob, Polda DIY, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Kalimantan Tengah dan Polda Maluku Utara.



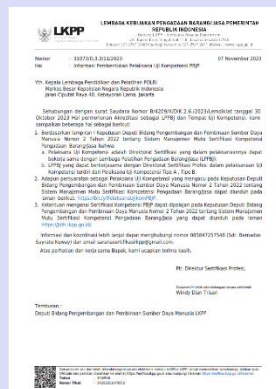
Selain itu dilakukan penyusunan Surat Perintah Kapolri untuk menetapkan Tenaga Kediklatan dan Fasilitator Tetap PBJ LPPBJ Lemdiklat Polri, revisi SOP Penyelenggaraan Pelatihan dan membuat laporan penyelenggaraan Pelatihan dan Ujian Kompetensi PBJ Level-1, serta surat permohonan Akreditasi dan Tempat Ujian Kompetensi (TUK).





Tim Efektif juga melengkapi persyaratan untuk menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) kepada Direktorat Sertifikasi LPKK setelah mendapatkan surat tanggapan dari Direktur Sertifikasi LPKK pada tanggal 7 November 2023. Adapun persyaratan TUK yang dipersiapkan adalah:

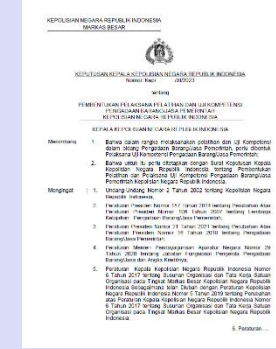
1. Formulir Self Assessment TUK Mandiri dan lampirannya.
2. Formulir Self Assessment Pelaksana Ujikom.
3. Rancangan Keputusan Pembentukan.
4. Rancangan Keputusan Struktur Organisasi dan Pengangkatan Personel.
5. Rencana Sumber Anggaran.
6. Formulir Rencana Kegiatan.
7. Rancangan SOP Penerimaan Peserta Uji Kompetensi.
8. Rancangan SOP Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pengelola PBJ dan Personil Lainnya.
9. Rancangan SOP Pelaksanaan Uji Kompetensi Level-1.
10. Rancangan SOP Pelaksanaan Audit Mutu Internal.



No	Persyaratan	Ya	Tidak	Salah	Sampel
1	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kejuruan	✓			Lampiran 1
2	Kejuruan	✓			Lampiran 1
3	Kejuruan	✓			Lampiran 1
4	Kejuruan	✓			Lampiran 1
5	Kejuruan	✓			Lampiran 1
6	Kejuruan	✓			Lampiran 1
7	Kejuruan	✓			Lampiran 1
8	Kejuruan	✓			Lampiran 1
9	Kejuruan	✓			Lampiran 1
10	Kejuruan	✓			Lampiran 1
11	Kejuruan	✓			Lampiran 1
12	Kejuruan	✓			Lampiran 1
13	Kejuruan	✓			Lampiran 1
14	Kejuruan	✓			Lampiran 1
15	Kejuruan	✓			Lampiran 1
16	Kejuruan	✓			Lampiran 1
17	Kejuruan	✓			Lampiran 1
18	Kejuruan	✓			Lampiran 1
19	Kejuruan	✓			Lampiran 1
20	Kejuruan	✓			Lampiran 1

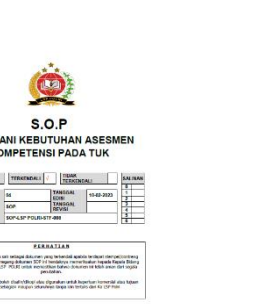


No	Persyaratan	Kategori	Ya	Tidak	Sampel	Keterangan
1	Kejuruan	✓				
2	Kejuruan	✓				
3	Kejuruan	✓				
4	Kejuruan	✓				
5	Kejuruan	✓				
6	Kejuruan	✓				
7	Kejuruan	✓				
8	Kejuruan	✓				
9	Kejuruan	✓				
10	Kejuruan	✓				
11	Kejuruan	✓				
12	Kejuruan	✓				
13	Kejuruan	✓				
14	Kejuruan	✓				
15	Kejuruan	✓				
16	Kejuruan	✓				
17	Kejuruan	✓				
18	Kejuruan	✓				
19	Kejuruan	✓				
20	Kejuruan	✓				



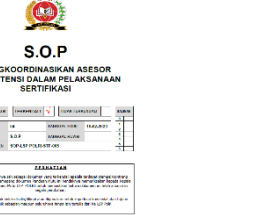
No	Persyaratan	Ya	Tidak	Salah	Sampel
1	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kejuruan	✓			Lampiran 1
2	Kejuruan	✓			Lampiran 1
3	Kejuruan	✓			Lampiran 1
4	Kejuruan	✓			Lampiran 1
5	Kejuruan	✓			Lampiran 1
6	Kejuruan	✓			Lampiran 1
7	Kejuruan	✓			Lampiran 1
8	Kejuruan	✓			Lampiran 1
9	Kejuruan	✓			Lampiran 1
10	Kejuruan	✓			Lampiran 1
11	Kejuruan	✓			Lampiran 1
12	Kejuruan	✓			Lampiran 1
13	Kejuruan	✓			Lampiran 1
14	Kejuruan	✓			Lampiran 1
15	Kejuruan	✓			Lampiran 1
16	Kejuruan	✓			Lampiran 1
17	Kejuruan	✓			Lampiran 1
18	Kejuruan	✓			Lampiran 1
19	Kejuruan	✓			Lampiran 1
20	Kejuruan	✓			Lampiran 1

No	Persyaratan	Kategori	Ya	Tidak	Sampel	Keterangan
1	Kejuruan	✓				
2	Kejuruan	✓				
3	Kejuruan	✓				
4	Kejuruan	✓				
5	Kejuruan	✓				
6	Kejuruan	✓				
7	Kejuruan	✓				
8	Kejuruan	✓				
9	Kejuruan	✓				
10	Kejuruan	✓				
11	Kejuruan	✓				
12	Kejuruan	✓				
13	Kejuruan	✓				
14	Kejuruan	✓				
15	Kejuruan	✓				
16	Kejuruan	✓				
17	Kejuruan	✓				
18	Kejuruan	✓				
19	Kejuruan	✓				
20	Kejuruan	✓				



No	Persyaratan	Ya	Tidak	Salah	Sampel
1	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kejuruan	✓			Lampiran 1
2	Kejuruan	✓			Lampiran 1
3	Kejuruan	✓			Lampiran 1
4	Kejuruan	✓			Lampiran 1
5	Kejuruan	✓			Lampiran 1
6	Kejuruan	✓			Lampiran 1
7	Kejuruan	✓			Lampiran 1
8	Kejuruan	✓			Lampiran 1
9	Kejuruan	✓			Lampiran 1
10	Kejuruan	✓			Lampiran 1
11	Kejuruan	✓			Lampiran 1
12	Kejuruan	✓			Lampiran 1
13	Kejuruan	✓			Lampiran 1
14	Kejuruan	✓			Lampiran 1
15	Kejuruan	✓			Lampiran 1
16	Kejuruan	✓			Lampiran 1
17	Kejuruan	✓			Lampiran 1
18	Kejuruan	✓			Lampiran 1
19	Kejuruan	✓			Lampiran 1
20	Kejuruan	✓			Lampiran 1

No	Persyaratan	Kategori	Ya	Tidak	Sampel	Keterangan
1	Kejuruan	✓				
2	Kejuruan	✓				
3	Kejuruan	✓				
4	Kejuruan	✓				
5	Kejuruan	✓				
6	Kejuruan	✓				
7	Kejuruan	✓				
8	Kejuruan	✓				
9	Kejuruan	✓				
10	Kejuruan	✓				
11	Kejuruan	✓				
12	Kejuruan	✓				
13	Kejuruan	✓				
14	Kejuruan	✓				
15	Kejuruan	✓				
16	Kejuruan	✓				
17	Kejuruan	✓				
18	Kejuruan	✓				
19	Kejuruan	✓				
20	Kejuruan	✓				





Jakarta dan Ujian Kompetensi menggunakan CAT di laboratorium komputer Pusdik Lantas Lemdiklat Polri di Serpong.



Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 72 (tujuh puluh dua) peserta dari personel Lemdiklat Polri dan Jajarannya yang dibagi dalam 2 (dua) kelas. Sedangkan ujian kompetensi diikuti oleh 66 (enam puluh enam) peserta karena 6 (enam) peserta tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian. Dalam penyelenggaraan ujian tersebut, **14 (empat belas) peserta lulus Ujian Kompetensi PBJ Level-1** sehingga

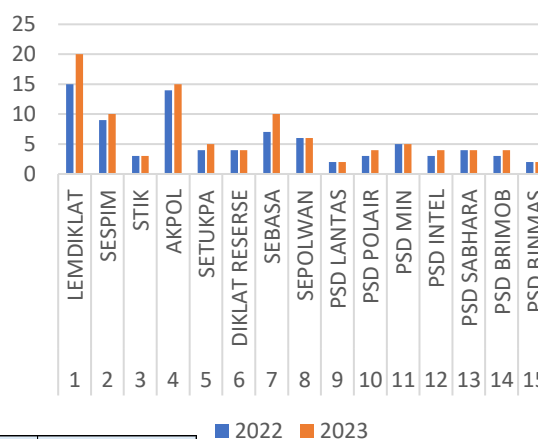


menambah jumlah Ahli Kompetensi PBJ di lingkungan Lemdiklat Polri dan Jajaran.



Dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut, LKPP memberikan kesempatan kepada Fasilitator PBJ Level-1 dari Polri yang telah memiliki Sertifikat Fasilitator

DATA AHLI PBJ LEVEL-1



NO	SATDIK JAJARAN	PBJ LEVEL-1		KOMPETENSI PPK		KOMPETENSI POKJA	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	LEMDIKLAT	15	20	-	2	20	2
2	SESPIM	9	10	-	-	10	-
3	STIK	3	3	-	-	3	-
4	AKPOL	14	15	-	-	15	-
5	SETUKPA	4	5	-	-	5	-
6	DIKLAT RESERSE	4	4	-	-	4	-
7	SEBASA	7	10	-	-	10	-
8	SEPOLWAN	6	6	-	-	6	-
9	PSD LANTAS	2	2	-	-	2	-
10	PSD POLAIR	3	4	-	-	4	-
11	PSD MIN	5	5	-	-	5	-
12	PSD INTEL	3	4	-	-	4	-
13	PSD SABHARA	4	4	-	-	4	-
14	PSD BRIMOB	3	4	-	-	4	-
15	PSD BINMAS	2	2	-	-	2	-
JUMLAH		84	98	0	2	98	2

PBJ, yaitu dari Lemdiklat Polri dan Korbrimob Polri yang tentunya memberikan pengalaman kepada Fasilitator PBJ Polri serta mendukung data Akreditasi.

2. Sosialisasi dan Pelatihan TKDN yang diselenggarakan dengan metode tatap muka pada tanggal 31 Oktober s.d. 2 November



2023 di Hotel Grand Whiz Points Jakarta yang diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) orang Pejabat Pembuat Komitmen



(PPK) dan 34 (tiga puluh empat) orang Pokja Pemilihan dari Lemdiklat Polri dan Jajaran.



Kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) kelas, yaitu kelas PPK dan kelas Pokja Pemilihan dengan Fasilitator berasal dari Kementerian Perindustrian, Lemdiklat Polri dan LKPP.



3. Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan dengan metode tatap muka pada tanggal 15 s.d. 16 November 2023 di Hotel



Arosa Bintaro Jakarta dengan peserta 20 (dua puluh) orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 22 (dua puluh dua) orang Pokja Pemilihan dari Lemdiklat Polri dan Jajaran.

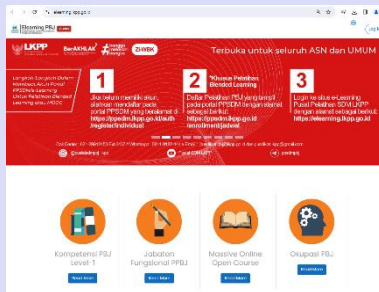


Kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) kelas, yaitu kelas PPK dan kelas Pokja Pemilihan dengan Fasilitator PBJ Level-3 berasal dari Lemdiklat Polri dan LKPP.



Bimbingan Teknis ini diselenggarakan untuk mempersiapkan PPK dan Pokja Pemilihan untuk mengikuti Uji Kompetensi PPK dan Uji Kompetensi Pokja Pemilihan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bahwa mulai tanggal 1 Januari 2024 PPK dan Pokja Pemilihan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.



Dalam rapat tanggal 4 Oktober 2023, Puslat SDM PBJ LKPP menjelaskan bahwa model pembelajaran yang dilaksanakan melalui *e-learning* dilakukan metode *blended learning* dan *Massive Open Online Course (MOOC)*. MOOC PBJ merupakan program pelatihan yang memberikan akses kepada seluruh SDM PBJ untuk mengikuti pelatihan PBJ secara:

1. *Massive* (tanpa batasan jumlah peserta)
2. *Open* (terbuka untuk umum)
3. *Online* (dapat diakses secara daring)



Dengan keunggulan:

1. Waktu yang fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif
2. Jangkauan peserta lebih luas
3. Sesuai dengan kebutuhan peserta
4. Hemat biaya

## Program Pelatihan PBJ model MOOC

### Fungsional

- Pelatihan Pembentukan Jabfung Pengelola PBJ

### Teknis Kompetensi

- Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1
- Pelatihan Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C
- Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan

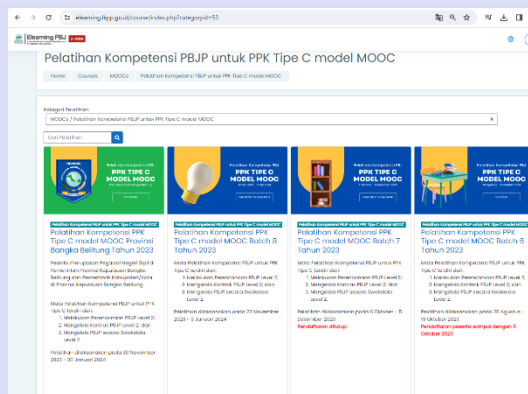
### Teknis Tematik

- Pelatihan PBJ Tingkat Dasar
- Pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha Kecil
- Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP)
- Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di\_Desa
- Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam PBJP
- Pelatihan P3DN Dalam PBJP bagi PA/KPA

Bentuk pelaksanaan MOOC PBJ dalam pelaksanaannya terdiri dari 3 (tiga) pola, yaitu:

1. Pola 01, di LMS Puslat SDM PBJ LKPP, dimana kelas umum di kelola oleh Puslat SDM PBJ LKPP.

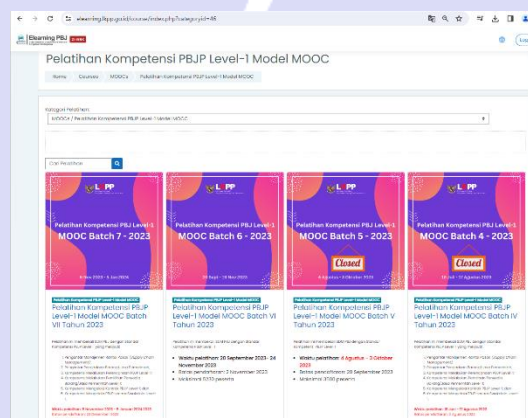
2. Pola 02, di LMS Puslat SDM PBJ LKPP, dimana kelas khusus dikelola oleh LPPBJ, dengan ketentuan:



- a. LPPBJ mengajukan permohonan fasilitasi MOOC menggunakan LMS Puslat SDM PBJ;
- b. LPPBJ menandatangani Form Service Level Agreement (SLA) pengelolaan MOOC di LPPBJ;

- c. Puslat SDM PBJ membuat kelas dan mengundang TOC (Pengelola Kelas) LPPBJ sebagai admin;
- d. LPPBJ menyelenggarakan Pelatihan PBJ model MOOC dengan TOC LPPBJ sebagai pengelola;
- e. LPPBJ menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan ke Puslat SDM PBJ LKPP.

3. Pola 03, di LMS LPPBJ, dikelola oleh LPPBJ, dengan ketentuan:



- a. LPPBJ mengajukan permohonan untuk pengelolaan MOOC PBJ di LMS LPPBJ;
- b. LPPBJ menandatangani Form Service Level Agreement (SLA) pemanfaatan bahan ajar MOOC;
- c. LPPBJ menyelenggarakan

- d. LPPBJ menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala ke Puslat SDM PBJ

Dengan adanya beberapa pola pelaksanaan MOOC, maka LPPBJ Lemdiklat Polri **dalam jangka menengah** dapat mengimplementasikan e-learning dengan **menggunakan LMS Puslat SDM PBJ LKPP**. Hal tersebut dapat dipegunakan sebagai pembelajaran dan peningkatan keterampilan dalam **mengelola PBJ secara e-learning**. Hal tersebut tentunya dapat terlaksana setelah LPPBJ Lemdiklat Polri **mendapatkan Akreditasi**.

Dalam implementasi grand desain e-learning LPPBJ Lemdiklat Polri, maka Tim Efektif yang membidangi hal tersebut menyusun draft konsep awal grand desain e-learning tersebut.



DRAFT KONSEP GRAND DESAIN  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
BERBASIS E-LEARNING

November 2023



*e-learning*

### III. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

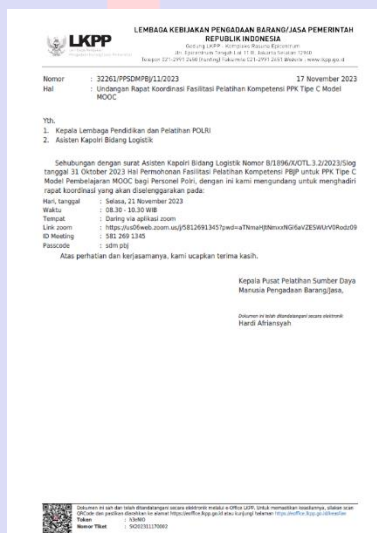


Dalam melaksanakan Proyek Peubahan ini, stakeholder utamanya adalah LKPP, khususnya Puslat SDM PBJ LKPP. **Komunikasi awal** pada tanggal 1 September 2023 yang

dilaksanakan pada saat penyusunan Rancangan Proyek Perubahan, yaitu tahap **Taking Ownership** yang diarahkan oleh **Coach** serta mendapatkan dukungan Stakeholder utama lainnya, yaitu pimpinan Lemdiklat Polri merupakan kunci sukses untuk melaksanakan Proyek Perubahan ini.



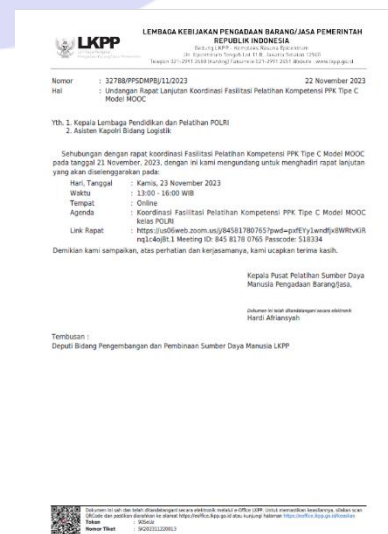
Komunikasi dan koordinasi yang intens dengan LKPP, baik pada saat rapat awal, persiapan pelatihan-pelatihan, pelaksanaan pelatihan, pengajuan akreditasi sampai kegiatan visitasi dalam rangka akreditasi menjadikan hubungan Lemdiklat Polri dengan LKPP menjadi harmonis dan sinkron berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan PBJ kedepannya.



#### Komunikasi

tersebut tidak hanya

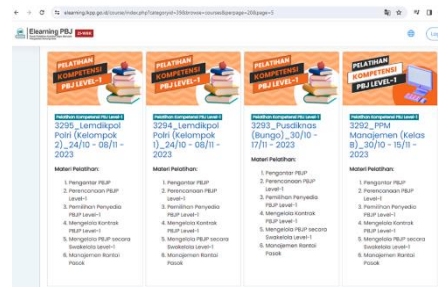
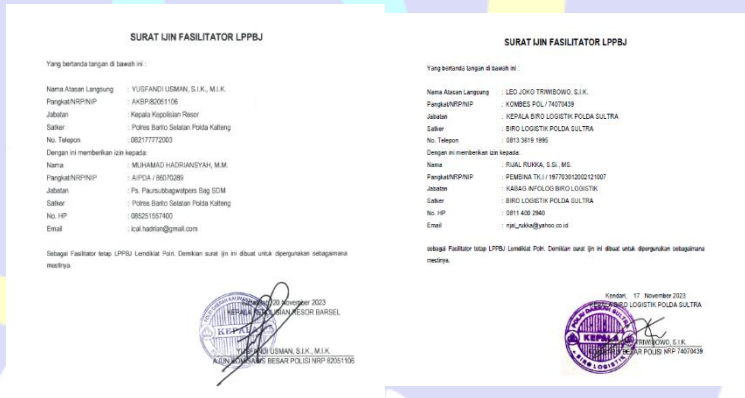
dilakukan oleh **Project Leader** saja, namun juga oleh **Tim Efektif**. Hal tersebut tercermin dengan adanya undangan rapat dari LKPP terkait pelaksanaan pelatihan MOOC PPK Tipe C khusus Polri yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Rapat pertama telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2023 via zoom meeting dan rapat lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023.



Komunikasi juga dilakukan kepada Stakeholder lainnya pada saat melaksanakan kegiatan seperti kunjungan yaitu ke Pusedik Polair, SPN Polda



Banten dan SPN Polda Lampung, serta kepada peserta pelatihan pada saat penyelenggaraan pelatihan PBJ oleh Lemdiklat Polri. Selain itu, dilakukan juga komunikasi dengan Fasilitator PBJ Polri dari Satker Korbrimob, Polda DIY, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Kalimantan Tengah dan Polda Maluku Utara untuk mendukung Akreditasi LPPBJ serta kesiapan sebagai Fasilitator PBJ baik dalam pembelajaran *e-learning* pada tahap *synchronous* maupun tatap muka.



Implementasi marketing yang dilakukan dengan mengembang strategi *marketing mix*:

**1. Customer**

Kepada Pengemban Fungsi Logistik dan Personel Polri yang berperan sebagai SDM PBJ, terutama peserta pelatihan PBJ yang diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri serta para Fasilitator Polri diperkenalkan tentang rencana pelatihan melalui e-learning setelah LPPBJ Lemdiklat Polri lulus Akreditasi.

**2. Product**

Produk yang diperkenalkan adalah Akreditasi LPPBJ Lemdiklat Polri dan e-learning PBJ, sehingga setelah LBBPJ Lemdiklat Polri terakreditasi, maka pengusulan penyelenggaraan Pelatihan PBJ seluruh Satker Polri difasilitasi oleh Lemdiklat Polri.

**3. Price**

Pelaksanaan Proyek Perubahan ini dalam pelaksanaan pelatihan PBJ tahun 2023 yang diselenggarakan Lemdiklat Polri menggunakan anggaran DIPA/APBN. Pemanfaatan e-learning dengan menggunakan metode MOOC sepenuhnya gratis, sehingga peserta dari seluruh satker Polri dapat mengikutinya tanpa biaya.

**4. Place**

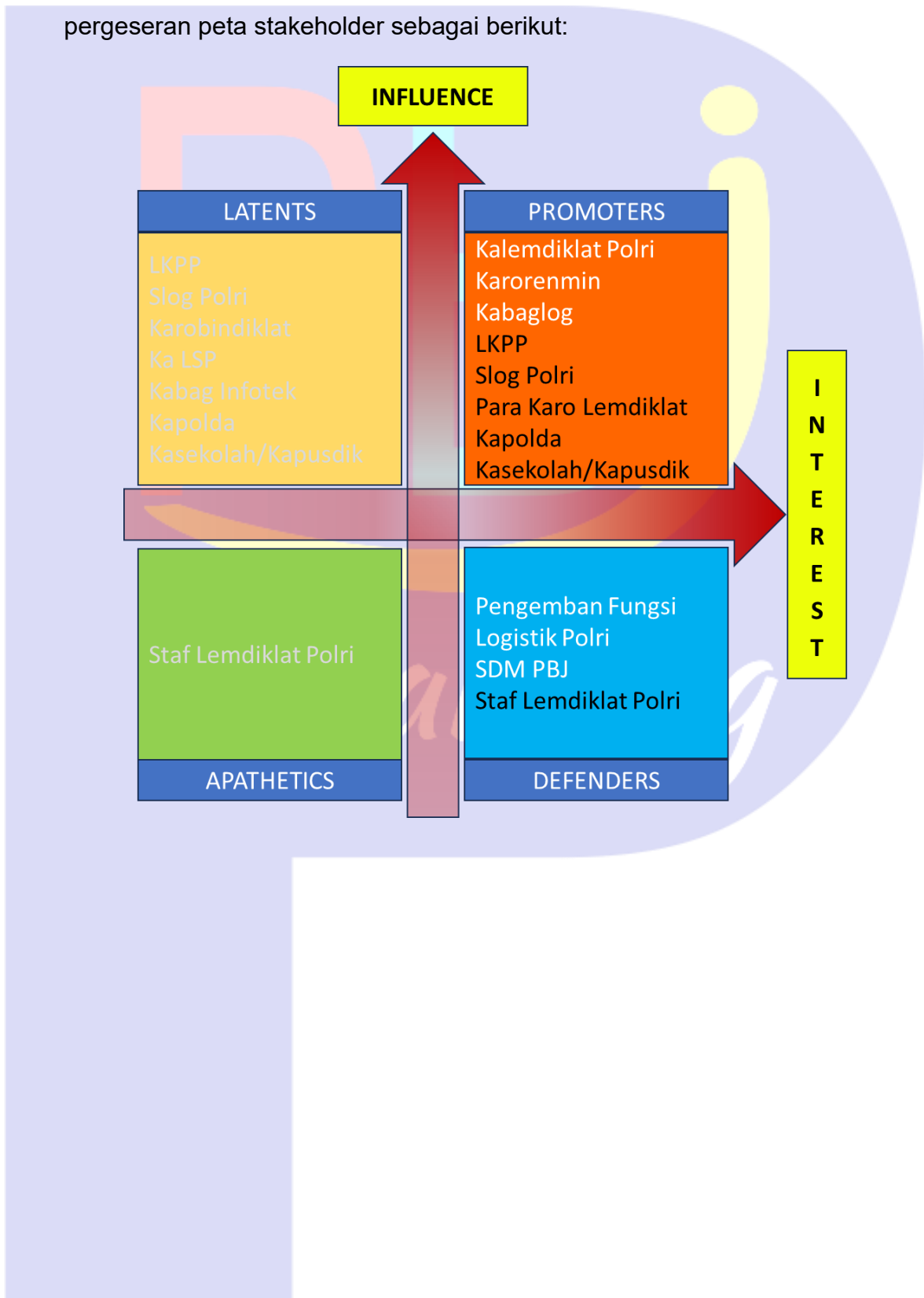
Penyelenggaraan pelatihan PBJ dengan metode e-learning dapat dilakukan di lokasi masing-masing peserta seperti yang telah dilaksanakan dalam Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1, sedangkan penyelenggaraan secara tatap muka dapat di fasilitasi di lokasi yang ditetapkan oleh Satker Penyelenggara, seperti Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 yang rencananya akan di selenggarakan oleh Pusdik Min Lemdiklat Polri pada bulan Desember 2023.

**5. Promotion**

Promosi secara terbuka akan dilakukan setelah diterbitkannya Akreditasi LPPBJ Lemdiklat Polri, namun promosi telah dilakukan kepada peserta pelatihan dan Fasilitator PBJ Polri.

#### IV. PERUBAHAN PETA STAKEHOLDER

Dengan terlaksananya implementasi Proyek Perubahan, maka terdapat pergeseran peta stakeholder sebagai berikut:





## VI. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Dalam rangka strategi pengembangan kompetensi dalam Proyek Perubahan, Project Leader telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh ASN Berpijar secara online, yaitu pelatihan Seni Berkomunikasi, Membina Kerjasama Tim dan Transformasi Digital Sektor Publik.

### 1. Seni Berkomunikasi

Setelah mempelajari seni berkomunikasi, *Project Leader* lebih memahami cara berkomunikasi baik dengan Tim Efektif maupun dengan *Stakeholder*. Dengan mempelajari materi tersebut *Project Leader*



memahami bagaimana komunikasi dua arah yang baik, menjadi pendengar yang baik, mampu menyampaikan ide dan gagasan kepada orang lain, membantu memahami karakter orang, menunjang penyelesaian konflik dan mempermudah pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berdampak pada kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan.

### 2. Membina Kerjasama Tim



Dalam membina kerjasama tim, seseorang harus memiliki mindset, memiliki citra diri dan memiliki mental pemenang. Dengan memiliki kepercayaan diri, tujuan akan lebih mudah dicapai. Dalam membina

kerjasama tim, *Project Leader* harus memiliki **komitmen**, **optimis** dan mau **bekerja keras**, **fokus pada hasil** yang diperoleh, berani mengambil resiko, menyukai perubahan, terbiasa pada ketidakpastian dan **toleransi terhadap kegagalan** sebagai proses pembelajaran. Dengan demikian mampu menggerakkan Tim Efektif bekerja untuk tujuan bersama.

### 3. Transformasi Digital Sektor Publik

Transformasi digital adalah membayangkan kembali bagaimana mempersatukan orang, data, dan proses untuk menciptakan nilai bagi

costumer dan mempertahankan keunggulan kompetitif di dunia yang mengedepankan teknologi digital. Transformasi digital dalam pemerintahan telah menjadi trend global. Wabah covid misalnya, menjadikan banyak negara memanfaatkan teknologi digital dalam hampir seluruh aspek, seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan perbankan, dan kegiatan perkantoran.

Transformasi digital pada sektor publik adalah kesederhanaan, membuat layanan pemerintah menjadi lebih sederhana, cepat, jelas dan mudah dipahami. Hal ini tentunya tepat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan Pelatihan PBJ, sehingga peserta pelatihan mendapatkan kemudahan, lebih hemat, dan memperoleh hasil tes/ujian yang jelas dan sesuai.



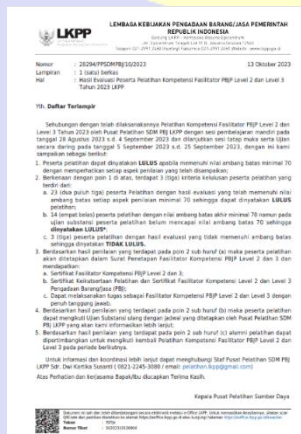
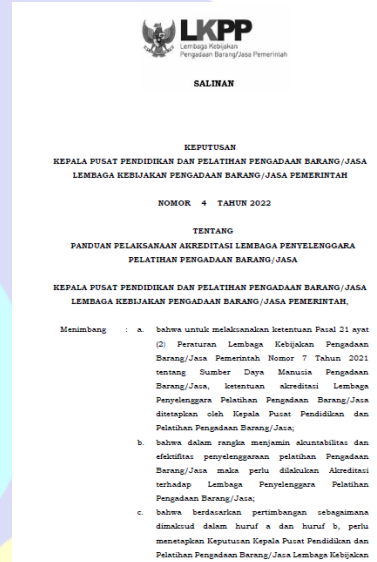
*e-learning*

## VII. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROPER

Mata pelatihan pilihan yang dipelajari adalah:

### 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Materi ini berkaitan erat dengan implementasi Proper. Dengan mempelajari materi tersebut Project Leader memahami peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pelatihan PBJ. Dalam melengkapi data dan persyaratan Akreditasi tentunya harus berpedoman pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh LKPP, yaitu Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2022. Selain itu, Project Leader juga



No	Nama	Instansi	Keterangan
1.	Abdi Lela	SKPD Ditjen dan	Belum Lulus
2.	Abdi Sulaiman Pado	Korwil Pengkajene dan	Lulus
3.	Ahmad H. Rizwan Yozan	Yogyakarta	Lulus
4.	Abdi Tahir B. Turban	Belanda	Lulus
5.	Agung Kurniawan	Belanda	Lulus
6.	Amalia Rizka Syarif	UKP	Lulus
7.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
8.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
9.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
10.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
11.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
12.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
13.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
14.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
15.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
16.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
17.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
18.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
19.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
20.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
21.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
22.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
23.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
24.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
25.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
26.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
27.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
28.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
29.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
30.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
31.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus
32.	Arif Nur Hafid	Belanda	Lulus



mengikuti Pelatihan Kompetensi Fasilitas PBJP Level-2 dan Level-3

yang diselenggarakan oleh LKPP. Dengan mengikuti pelatihan ini, Project Leader dapat menjadi Fasilitas Pelatihan Kompetensi PBJ Level-2 dan Level-3.

### 2. Manajemen Pemerintahan



Manajemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai negara. Salah satu tugas pokok pemerintah dalam 7 (tujuh) bidang pelayanan adalah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Fungsi pemerintahan adalah melakukan

pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Setelah mempelajari manajemen pemerintahan, hal ini berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada peserta pelatihan melalui metode pembelajaran *e-learning* sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menghasilkan SDM PBJ yang profesional.

### 3. Manajemen Keuangan Negara



Manajemen keuangan negara berkaitan dengan penyusunan perencanaan keuangan negara. Dimana penganggaran berbasis kinerja, dalam hal ini berkaitan dengan rencana kerja yang direncanakan.

Keterkaitan dengan Proper ini adalah dalam segi keberlanjutan Proper, bahwa apa yang telah diimplementasikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dapat terus berlanjut sehingga memberikan kemanfaatan dan kebergunaan yang terus meningkat bagi oraganisasi, stakeholder, user dan masyarakat.

*e-learning*



## IX. LESSON LEARNT



Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disingkat SDM PBJ yaitu Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tidak langsung memiliki peran penting dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu profesionalitas SDM PBJ tersebut harus terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pelatihan PBJ, sertifikasi dan standar kompetensi PBJ dan untuk pengendalian mutu tersebut maka diperlukan Akreditasi LPPBJ.

Pelaksanaan pelatihan PBJ melalui *e-learning* merupakan suatu terobosan inovasi yang perlu dilaksanakan sebagai sarana pelatihan PBJ yang memberikan kemudahan dan kesempatan yang luas khususnya kepada Personel Polri dan PNS Polri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mencapai hal tersebut, maka **komunikasi** dan **kolaborasi** dengan LKPP merupakan kunci sukses yang harus dilaksanakan. Strategi komunikasi dengan Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP dapat berjalan dengan baik karena persamaan persepsi dan keinginan mewujudkan SDM PBJ yang profesional.

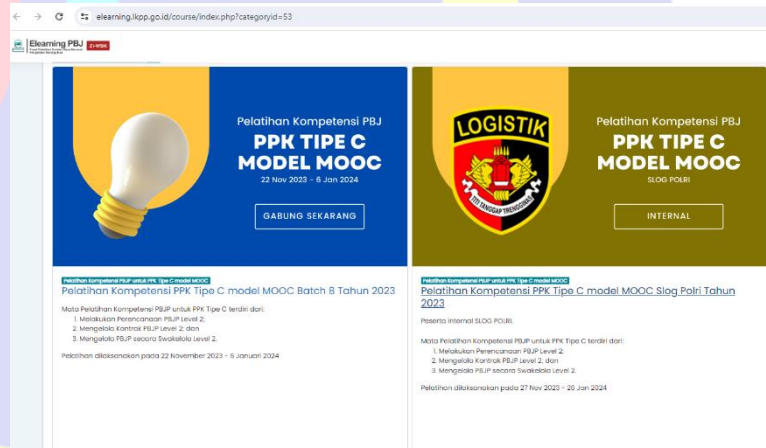


Dukungan Tim Efektif yang kuat sangat mendukung keberhasilan mencapai tujuan. Penyelenggaraan pelatihan PBJ yang semula tidak terencana, namun harus dilaksanakan dalam rangka penjaminan mutu guna memenuhi persyaratan Akreditasi tidak akan berhasil tanpa dukungan Tim Efektif yang memiliki visi yang sama dalam mencapai tujuan.

Perubahan rencana bukanlah suatu kegagalan, namun sebagai organisasi yang adaptif harus mampu menciptakan peluang untuk lebih mamantapkan langkah untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Penyelenggaraan Pelatihan PBJ yang berkolaborasi dengan LKPP memberikan dampak besar kepada *Project Leader* dan Tim Efektif, karena melaksanakannya secara *On Job Training* (OJT) dengan penjaminan mutu dari LKPP.

Langkah kedepannya setelah terakreditasinya LPPBJ Lemdiklat Polri adalah melaksanakan pelatihan PBJ secara *e-learning*. Secara bertahap dilakukan dengan menggunakan LMS Puslat SDM LKPP sebagai sarana pembelajaran bagi pengelola IT LPPBJ menggunakan pelatihan PBJ e-learning sebelum dibangunnya LMS PBJ Lemdiklat Polri.



*e-learning*

## X. PENUTUP

### A. Kesimpulan

**KOMUNIKASI** dan **KOLABORASI** dengan stakeholder utama yaitu LKPP merupakan kunci sukses dalam mengimplementasikan proyek perubahan. Dukungan pimpinan Lemdiklat Polri, bimbingan Mentor, dan Coach, serta kerja keras dan kekompakan Tim Efektif merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya.

Perubahan rencana yang telah disusun tidak serta merta menghambat pencapaian tujuan namun dapat membuka peluang untuk lebih memantapkan langkah awal yaitu **Akreditasi LPPBJ Lemdiklat Polri**. Dengan Akreditasi LPPBJ Lemdiklat Polri maka langkah mencapai tujuan e-learning PBJ akan lebih mudah dicapai terutama dengan melakukan kolaborasi menggunakan LMS Puslat PBJ LKPP.

### B. Harapan

Merubah metode pelatihan di Polri dari metode tatap muka menjadi metode blended learning, e-learning dan MOOC bukanlah hal yang instan. Metode pelatihan PBJ secara e-learning diharapkan menjadi awal dalam penyelenggaraan pelatihan di Polri.

Terbangunnya grand desain e-learning PBJ tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk pelatihan PBJ, namun dapat dipergunakan untuk pelaksanaan pelatihan Fungsi Teknis Polri sehingga dapat menghasilkan SDM Polri yang **Profesional, Modern, dan Terpercaya**.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Sprin Mentor
2. Sprin Tim Efektif
3. Dokumentasi Rapat Awal (Undangan, Notulen, Absen, Foto)
4. Dokumentasi Rapat dengan LKPP di LKPP (Surat permohonan, Surat balasan, Notulen, Absen, Foto, bahan paparan LKPP)
5. Dokumentasi Rapat dengan LKPP di Lemdiklat Polri (Undangan, bahan paparan, Notulen, Absen, Foto)
6. Dokumen Akreditasi
  - a. Surat permohonan Akreditasi dan TUK, link google drive
  - b. Dokumen pendukung Akreditasi
    - 1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
    - 2) Dokumen Fasilitator:
      - Daftar Riwayat Hidup
      - Surat Pernyataan Fasilitator Tetap
      - Surat Ijin Atas sebagai Fasilitator Tetap
      - Sertifikat Fasilitator PBJ
      - Surat Perintah Kapolri tentang Penetapan sebagai Fasilitator PBJ Polri
    - 3) Dokumen Pengelola Pelatihan (MOT)
      - Daftar Riwayat Hidup
      - Sertifikat MOT
      - Sprin Kegiatan sebagai MOT
      - Surat Perintah Kapolri tentang Penetapan sebagai Tenaga Kediklatan PBJ Polri
    - 4) Dokumen Pengelola Kelas (TOC)
      - Daftar Riwayat Hidup
      - Sertifikat TOC
      - Sprin Kegiatan sebagai TOC
      - Surat Perintah Kapolri tentang Penetapan sebagai Tenaga Kediklatan PBJ Polri

- 5) Dokumen Pengelola IT
  - Daftar Riwayat Hidup
  - Sertifikat Pelatihan IT
  - Ijazah Sarjana Komputer
  - Sprin Kegiatan sebagai Pengelola IT
  - Surat Perintah Kapolri tentang Penetapan sebagai Tenaga Kediklatan PBJ Polri
- 6) Dokumen Analis Kebutuhan Diklat
  - Daftar Riwayat Hidup
  - Ijazah Sarjana Pendidikan
  - Laporan AKD
  - Surat Perintah Kapolri tentang Penetapan sebagai Tenaga Kediklatan PBJ Polri
- 7) Dokumen Program Pelatihan
  - Renstra Lemdiklat Polri 2020 – 2024
  - Renja Lemdiklat Polri 2021, 2022, 2023, 2024
  - Surat Pernyataan
- 8) Dokumen Unsur Pembiayaan
  - DIPA Lemdiklat Polri T.A. 2021, 2022, 2023
  - Standar Biaya Masukan 2023
  - Standar Biaya Honorarium Fasilitator PBJ
- 9) Dokumen Standar Mutu
  - SOP Penyelenggaraan Pelatihan PBJ
  - Laporan Implementasi SOP Pelatihan PBJ Tahun 2022 dan 2023
- 10) Dokumen Kurikulum
  - Kurikulum PBJ
  - Laporan Hasil Pelatihan Selain Pelatihan PBJ
  - Materi Tambahan untuk Pelatihan PBJ – Materi PBAK
- 11) Dokumen Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelatihan PBJ
- 12) Dokumen Program dan Jumlah Pelatihan PBJ
- 13) Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
  - Hasil Indeks Kepuasan Peserta
  - Rata-rata Tingkat Kelulusan Ujian

- c. Dokumen Pendukung TUK
  - 1) SOP Mengkoordinasikan Asessor
  - 2) SOP Melayani Kebutuhan Asesmen Kompetensi Pada TUK
  - 3) Formulir Self Asesmen TUK Mandiri
  - 4) Formulir Self Asesmen Pelaksana Uji Kompetensi
  - 5) Daft Rancangan Keputusan Kapolri Pembentukan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJ Polri
  - 6) Draft Rancangan Struktur Organisasi Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJ Polri
  - 7) Surat Pernyataan Sumber Anggaran
  - 8) Formulir Rencana Kegiatan
  - 9) SOP Pelaksana Uji Kompetensi
  - 10) Data Peserta Lulus Uji Kompetensi
- d. Surat pemberitahuan visitasi Akreditasi
- e. BA Hasil Visitasi, dan dokumentasi kegiatan visitasi
- f. Surat informasi pembentukan TUK
- g. Surat pemberitahuan visitasi
- h. BA Hasil Visitasi, dan dokumentasi zoom meeting visitasi
- 7. Dokumen Grand Desain E-Learning
  - a. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015
  - b. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021
  - c. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2023
  - d. Nota Dinas Ketua Tim Grand Desain dan disposisi Kabaglog, Draft Konsep Grand Desain E-Learning, dokumentasi
- 8. Dokumen PKS
  - a. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 dan Lampirannya
  - b. Nota Kesepahaman Polri dengan LKPP
  - c. PKS Slog Polri dengan LKPP
- 9. Dokumen Pelatihan PBJ
  - a. Dokumen Pelatihan dan Ujian Kompetensi PBJ Level-1
    - 1) Telegram Kalemdilat Polri
    - 2) Surat permohonan fasilitasi pelatihan ke LKPP
    - 3) Surat Jawaban fasilitasi LKPP
    - 4) Surat Perintah Panitia Pelatihan

- 5) Surat Perintah Peserta Pelatihan
  - 6) Surat Permohonan Verifikasi peserta ujian
  - 7) Amanat Pembukaan Pelatihan
  - 8) Jadwal E-Learning
  - 9) Jadwal Luring
  - 10) Absen Peserta
  - 11) Data Peserta Ujian
  - 12) Berita Acara Hasil Ujian Kompetensi
  - 13) Dokumentasi Kegiatan
  - 14) Laporan Pelaksanaan Kegiatan
  - 15) Modul Pelatihan
  - 16) Slide Pelatihan
  - 17) Bahan Evaluasi Pelatihan
  - 18) Hasil Pretest, Post Test dan Evaluasi Pelatihan
- b. Dokumen Sosialisasi dan Pelatihan TKDN
- 1) Sprin Panitia dan Peserta
  - 2) Undangan Peserta
  - 3) Surat Permohonan Narasumber
  - 4) Amanat Pembukaan
  - 5) Jadwal Kegiatan
  - 6) Absensi Peserta
  - 7) Materi Pelatihan
  - 8) Hasil Pretest dan Post Test
  - 9) Materi Praktek
  - 10) Laporan Pelaksanaan Kegiatan
- c. Dokumen Bimbingan Teknis Uji Kompetensi PPK dan Pokja Pemilihan
- 1) Sprin Panitia
  - 2) Sprin Peserta
  - 3) Surat Permohonan Narasumber
  - 4) Amanat Pembukaan
  - 5) Jadwal Bimtek
  - 6) Absensi Peserta
  - 7) Laporan Pelaksanaan Kegiatan
  - 8) Materi Bimtek

- 9) Slide Pelatihan
- 10) Materi Latihan
10. Dokumen Keberlanjutan
  - a. Komitmen Keberlanjutan
  - b. Nota Dinas Permohonan Anggaran
  - c. Undangan Rapat dari LKPP
  - d. Dokumentasi zoom meeting
  - e. Kegiatan Pelatihan MOOC PPK Tipe C Khusus Polri di LMS LKPP
11. Dokumen Dukungan
12. Dokumen Self Learning
13. Kuisisioner Aktualisasi Kepemimpinan Strategis

Dokumen Lampiran dapat di unduh pada link google drive [https://drive.google.com/drive/folders/1NOax9QVIak0b4nVpuIn8M\\_OxRD3IMgZf?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1NOax9QVIak0b4nVpuIn8M_OxRD3IMgZf?usp=sharing)

*e-learning*